

PPDB SMA/SMK NEGERI DIY

Kini Radius 300 Meter Prioritas Diterima

YOGYA (KR) - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri di DIY sudah mulai tahapan awal, khususnya untuk program kelas khusus. Sedangkan untuk reguler akan dimulai pengajuan akun dan pengambilan token 21-24 Juni 2022. Pemilihan sekolah 27-29 Juni 2022. Seleksi 27-30 Juni 2022.

Untuk tahun ini, PPDB tetap terbagi dalam 4 jalur dengan kuota masing-masing. Yakni jalur zonasi (55 persen), afirmasi (20 persen), pindah orang tua (5 persen) dan prestasi (20 persen). Sedangkan proses seleksi menggunakan nilai gabungan yang terdiri dari nilai raport, hasil ASPD akreditasi sekolah dan tambahan prestasi jika ada.

Bedanya dengan tahun sebelumnya, untuk jalur zonasi akan memberi prioritas kepada calon siswa yang berdomisili dalam radius 300 meter dari sekolah.

"Mereka yang mendaftar di SMA dan SMK, jika domisilinya jaraknya tidak lebih dari 300 meter, maka diterima di sekolah tersebut," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya, Rabu (1/6) menanggapi pertanyaan ada ketentuan terbaru di jalur zonasi.

Dijelaskan, diberlakukannya ketentuan tersebut, sebagai wujud dari semangat zonasi. Karena sejumlah kasus ditemukan, anak yang dekat dengan sekolah, tidak bisa bersekolah sehingga terpaksa mencari sekolah yang jauh. "Ini

menjadikan sekolah di dekatnya hanya menjadi menara gading," ujar Didik.

Diakuinya bahwa jumlah calon siswa di radius 300 meter, berbeda-beda jumlahnya, tergantung kepadatannya. "Saya yakin, jumlahnya di radius 300 meter tidak banyak, sehingga tidak menyedot banyak kuota zonasi berbasis nilai gabungan," jelasnya.

Dijelaskan pula, saat ini tidak semua lulusan SMP akan melanjutkan ke SMA. Tidak sedikit dari mereka memilih SMK demi untuk dapat langsung bekerja.

Ketentuan yang baru lainnya, yakni untuk tambahan nilai prestasi, selain dapat digunakan untuk jalur prestasi, tetapi juga dapat digunakan untuk jalur zonasi. (Jon)-d

DIGUNAKAN 17 JUTA ORANG

Meningkat, Pemanfaatan Fitofarmaka

JAKARTA (KR) - Penggunaan fitofarmaka terutama untuk kepentingan imun therapy, daya tahan tubuh terus meningkat. Sepanjang pandemi Covid-19 diperkirakan 17 juta orang telah menggunakan produk-produk fitofarmaka untuk imun therapy dan terbukti berhasil.

Karena itu Kementerian Kesehatan secara resmi meluncurkan formularium fitofarmaka, Selasa (31/5). Launching formulium fitofarmaka dilakukan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono sebagai rangkaian acara Temu Bisnis Tahap III, di Jakarta Conventional Center (JCC).

Sebelumnya, Kemenkes telah menerbitkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1163/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Formulium Fitofarmaka. Ini adalah pedoman bagi sarana pelayanan kesehatan dalam pemilihan fitofarmaka untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan melalui mekanisme penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Wamenkes menyebut, fitofarmaka atau obat tradisional sudah dimanfaatkan secara luas di Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

"Berdasarkan studi Balitbangkes, sebanyak 75 persen masyarakat mengkonsumsi obat tradisional untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh selama pandemi Covid-19," kata Wamenkes.

Karena itu, ke depan diharapkan obat-obatan herbal ini dapat menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan kemandirian Indonesia dalam usaha pengobatan secara nasional. Wamenkes juga mendorong industri farmasi Indonesia supaya mengembangkan pengobatan fitofarmaka ini secara mandiri. "Kita dorong industri farmasi melakukan pengolahan secara efektif sesuai indikasi yang relevan sehingga dapat masuk fase uji klinik untuk kemudian membuktikan bahwa produk herbal tersebut terbukti efektif, dan menjadi fitofarmaka," lanjut Wamenkes.

Jika sudah menjadi fitofarmaka, dan masuk dalam formulium, maka produk tersebut, jelas Wamenkes dapat diresepkan oleh dokter. Ujungnya, produk fitofarmaka dapat digunakan di fasilitas kesehatan. "Untuk itu fitofarmaka harus uji klinis secara terstandar dengan baik," tegasnya. (Ati)-d

Menko

dan terjangkau guna mendukung transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Terkait percepatan transisi energi, ada tiga prioritas di bawah G20 untuk mencapai Net Zero Emision secara global pada pertengahan abad ini, yakni mengamankan aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi cerdas dan bersih, serta memajukan pembiayaan energi. "Meningkat sektor energi merupakan sumber dari sekitar tiga perempat emisi gas rumah kaca, kerangka kerja G20 untuk memandu transisi negara-negara ekonomi utama akan menjadi langkah maju yang besar dan penting secara sistemik bagi ekonomi global,

Sambungan hal 1

termasuk di dalamnya memperkuat koordinasi dan koherensi dengan agenda jalur keuangan G20. Kolaborasi dengan jalur keuangan bertujuan memberikan kerangka kerja keuangan dan investasi transisi. Penting juga untuk meningkatkan tindakan transisi di seluruh jalur Sherpa," tutup Menko Airlangga.

Sesi dialog dihadiri lebih dari 20 Duta Besar sebagai perwakilan anggota 3G dengan dimoderatori Menteri Luar Negeri Singapura Dr Vivian Balakrishnan dan sebagai narasumber lainnya perwakilan Troika G20 dari India dan Italia. (Fie)-d

'Tiong Hua'

Selain keduanya, dialog juga menghadirkan narasumber Ketua Pertubuhan Alkhadeem Kuala Lumpur Tuan Sheikh Hussain Lee, Pengarah Tiong Hua Foundation Dato' Shamsul Najmi bin Shamsuddin dengan moderator Dato' Mohd Zaini bin Hassan, Pendiri BebasNews.my Malaysia.

Menurut Tan Sri Lee, Tiong Hua (yang di Indonesia disebut Tionghoa) adalah sebuah falsafah, bukan nama kaum atau golongan. Menurutnya, falsafah ini terdiri dua kata yakni *Tiong* dan *Hua*. "Secara ringkas, Tiong Hua berarti jalan tengah untuk kemakmuran bersama," jelasnya.

Sebagai falsafah, menurut Lee Kim Yew yang juga pengusaha dan pemerhati masalah keagamaan dan peradaban ini, Tiong Hua berasal dari Ajaran Konghucu. Kata China atau Cina datang belakangan dan lebih merupakan penamaan terhadap sebuah negara atau bangsa. Falsafah Tiong Hua bisa dilekatkan kepada orang lain asalkan menghayati dan mengamalkan falsafah tersebut. Falsafah Tiong Hua menurukan sepuluh nilai ke-

baikan atau keutamaan, di antaranya kejujuran, loyalitas dan rasa malu (terhadap keburukan) dan perhatian kepada keluarga.

Sementara Ketua CDCC Jakarta yang juga tokoh Muhammadiyah M Din Syamsuddin, menjelaskan, Wawasan Wasathiyah Islam. Din dalam presentasinya menjelaskan, *wasathiyah* adalah watak ajaran Islam dan umat Islam dijadikan Allah SWT sebagai ummatan wasathan (umat jalan tengah).

"Oleh karena itu, *wasathiyah* menolak segala bentuk ekstrimisme yang menampilkan perilaku melampaui batas," tandas Din yang juga mempraksai dan mengetuai gerakan baru yaitu World Fulcrum of Wasathiyat Islam (Poros Dunia Wasathiyat Islam).

Selain menolak ekstrimisme, *wasathiyah* pada saat yang sama juga menentang segala bentuk egosentrisme, baik keagamaan, kebangsaan dan pengelompokan sosial-budaya serta politik.

Menurut mantan Ketum PP Muhammadiyah ini, ada tujuh kriteria *Wasathiyat Islam*, yaitu *i'tidal* (bertaku adil

dan menegakkan keadilan), *tawazun* (ke-seimbangan), *tasamuh* (toleransi), *syura* (bermusyawarah), *ishlah* (melakukan perbaikan dan perdamaian), *qudwah* (melakukan prakarsa perbaikan) dan *muwathanah* (kewargaan yakni menerima dan membangun negara). "Dengan penjelasan mengenai falsafah *Tiong Hua* berarti falsafah itu beririsan dan sejalan dengan *Wasathiyat Islam*, katanya.

Din menilai, kedua pandangan dunia tersebut dapat diurusutamakan sebagai dasar solusi bagi adanya peradaban baru yang damai, sejahtera, adil, makmur dan beradab.

Oleh karena itu, kedua falsafah/wawasan baik *wasathiyah* dan *Tiong Hua*, menjadi tema *The 8th World Peace Forum* (Forum Perdamaian Dunia Ke-8) yang akan diselenggarakan November 2022 di Solo. Forum akan menghadirkan 100 tokoh agama dan cendekiawan dari berbagai negara dan diharapkan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta atau Panitia Mukhtar Muhammadiyah sebagai mitra. (Fsy)-f

Pendidikan

Gubernur DIY menurukan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Databoks (2022) menampilkan kenaikan angka penduduk miskin di DIY. Jumlah kemiskinan bertambah signifikan sebesar 30,73 ribu jiwa. Pada Maret 2021 persentase penduduk miskin di perdatan (14,44%) lebih besar daripada di perkotaan (12,23%). BPS memetakan angka kemiskinan tertinggi pertama dan kedua diduduki oleh Kulonprogo (18,38%) dan Gunungkidul (17,69%).

Idealnya pertumbuhan ekonomi seirama dengan pemerataan kesejahteraan warga. Jika melihat kenyataan di lapangan, pertumbuhan ekonomi belum tentu berimplikasi pada kesejahteraan yang diinginkan. Setidaknya angka kesejahteraan yang dirasakan masyarakat berada di atas rata-rata. Langkah yang dipaparkan Sri Sultan HB X untuk menghapus kemiskinan bukan hanya melalui belanja bantuan sosial kiranya sangat tepat. Harus ada pemberdayaan ekonomi rakyat yang sifatnya partisipatoris. Salah satunya dengan menggenjot partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, maupun menengah (UMKM) dan pemberdayaan warga.

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan memang bersifat multidimensional. Maka solusinya harus holistik. Selain berbasis pelaku ekonomi yang melibatkan pelaku usaha, hemat penulis perguruan tinggi juga

Sambungan hal 1

hendaknya ambil bagian untuk pemberdayaan warga. Terdapat tiga program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang relevan untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan, yakni Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, dan Membangun Desa. Program ini antara lain bertujuan untuk mempererat hubungan kampus dan masyarakat.

Dalam kegiatan Proyek Kemanusiaan, mahasiswa didorong agar mampu memecahkan masalah sosial. Perumusan kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengobservasi kebutuhan di masyarakat. Misalnya, mendampingi tenaga kesehatan dalam menangani pandemi, termasuk membangun sistem sanitasi di sebuah desa terpencil. Sedangkan Kegiatan Wirausaha lebih menekankan pada perencanaan bisnis mikro. Mahasiswa diminta menyusun target jangka pendek maupun panjang. Beberapa mahasiswa bahkan mengajak berkolaborasi masyarakat untuk meningkatkan produk setempat.

Kedua program terakhir sebenarnya juga terintegrasi dengan kegiatan Membangun Desa. Bila dua program sebelumnya berbasis inovasi, Membangun Desa menekankan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang telah ada di masyarakat.

Pengentasan kemiskinan hendaknya ditempuh melalui praktik-praktik kolaboratif dan berkelanjutan. Fakta sejarah pendidikan di negeri ini menunjukkan keterkai-

tan gerakan pendidikan untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi. Pendirian Taman Siswa yang dilakukan Ki Hadjar Dewantara bermula dari tugas imperatif untuk bebaskan belunggu bumiputra terhadap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Tugas dan fungsi pendidikan inilah yang dilakukan Ki Hadjar dalam memperbaiki taraf kehidupan masyarakat waktu itu.

Mengedepankan pendidikan sesuai teladan Ki Hadjar berarti sekaligus membangkitkan dasar ekonomi kerakyatan. Ini juga merupakan misi pendidikan moral yang dinyatakan Ki Hadjar dalam tiga langkah (Ki Soerono Hadiwijoyo, 2006). Pertama, ekonomi kerakyatan berprinsip usaha bersama. Kedua, memberdayakan potensi manusia dan alam harus sejalan dengan Pancadarma, yaitu kodrat alam, kebudayaan, kemerdekaan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Ketiga, pendistribusian hasil ekonomi harus menyejahterakan warga secara merata.

Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan harus dilakukan secara bersama, bertahap, dan berkelanjutan. (Penulis adalah Kepala Lembaga Pengembangan UST, Guru Besar Pascasarjana UST dan UNY)-d

Soekarno

Sambungan hal 1

Aku bukan pentijpta Pantja Sila, begitu ditegaskan beliau. Pun aku tidak mendapatkan wahju seperti dikatakan sdr Suroso tadi. Sebab jg mendapat wahju hanjalah para Nabi, padahal aku hanjalah manusia biasa. Ini saja dijelaskan dengan kerendahan hati, kata Presiden. Begitu kutipan asli koran Kedaulatan Rakyat tersebut.

Dalam bagian lain di berita tersebut, dijelaskan bahwa Soekarno mendapat ilham, seperti manusia biasa. Dalam terbitan tersebut, Soekarno mengungkapkan dengan kerendahan

hati telah memohon kepada Tuhan.

Ditegaskan pula bahwa dirinya hanyalah penyambung lidah, hanya sekadar menggali Pancasila dari bumi Indonesia sendiri. Soekarno hanyalah penyambung lidah, pengemban amanah. Karena itu, Soekarno tidak ingin diagung-agungkan. Sehingga jangan berterima kasih kepada dirinya, melainkan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi petunjuk kepada Bung Karno. (Jon)-d

Royal

Sambungan hal 1

Pentas Ensambel Tiup Yogyakarta Royal Orchestra yang dipandu Wita dan Inggar ini, menurut konduktor Widoyitnowaditro, menampilkan 16 pemain dan tiga solois selain Prajurit Kraton Yogyakarta.

Pentas ini dibuka dengan lagu Indonesia

Pusaka dilanjutkan lagu Sepasang Mata Bola, Tanah Airku, Dari Sabang Sampai Merauke, dan Bagimu Negeri. Kemudian dilanjutkan dengan sejumlah lagu dan di-pungkasi dengan lagu daerah Lir Ilir. (Sal)-d

Ajak

Sambungan hal 1

menghadapi ujian. Hal itu telah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara karena masyarakat bertandaskan Pancasila.

Presiden mengingatkan masyarakat harus betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan untuk mewujudkan sistem masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan. Presiden pun meminta agar ada implementasi tata kelola pemerintahan yang menjiwai interaksi sesama anak bangsa.

"Inilah tugas kita bersama. Tugas seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadirannya dan manfaatnya bagi seluruh tumpah darah," kata Presiden.

Dikatakan Kepala Negara, situasi dunia masih diliputi pandemi Covid-19 dan krisis energi, pangan, kemiskinan, serta perang. Karena itu, sebagai pemegang mandat Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia mengajak seluruh negara maju untuk membangun sistem kesehatan global yang bisa menghadapi krisis pada masa depan. "Tentu perlu tata kelola sehat dan berperikemanusiaan dan berperikeadilan," katanya.

Presiden mengajak seluruh pemimpin pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemimpin lain untuk menjadi teladan dan contoh dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila. "Memperkokoh nilai Pancasila, mewujudkan Indonesia maju dan cita-cita proklamasi kemerdekaan," kata Presiden.

Saat berkunjung ke Rumah Tenun Ende usai upacara,

menaruh beberapa benda adat. Setelah mendapatkan gelar adat, Presiden dan Ibu Iriana menyaksikan Bupati Ende menggilingi Tubu Kanga (pusara adat) sebanyak empat kali yang memiliki arti penyatuan dengan alam yakni tanah, air, api, dan angin. Presiden juga menyempatkan melihat dan menyapa perajin tenun.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat NTT, khususnya masyarakat Ende, yang telah menerima saya, Bu Iriana, dan seluruh rombongan sejak awal datang sampai sekarang diterima dengan penuh kehangatan," ucap Presiden.

Presiden meyakini kehangatan masyarakat Ende juga pernah dirasakan Presiden Pertama RI Bung Karno, sehingga dapat melahirkan pemikiran dan renungan-renungan tentang Pancasila. (Ant/San)-d



Prakiraan Cuaca					
Kamis, 2 Juni 2022					
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	24-32	60-95
Sleman	☁	☁	☁	23-31	65-95
Wates	☁	☁	☁	24-32	65-95
Wonosari	☁	☁	☁	24-32	65-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	24-32	65-95



Monika Pretty Aprilia, SIP MSI
Dosen Ilmu Komunikasi
Universitas Amikom Yogyakarta

HINGGA saat ini, RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) masih terus digodok oleh Komisi I DPR RI. Panitia Kerja Komisi I DPR RI bersama dengan pemerintah belum menemukan titik terang mengenai lembaga pengawasan perlindungan data pribadi. Pemerintah menginginkan

Perlunya Perlindungan Data Pribadi Anak dalam RUU PDP

lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sedangkan DPR RI bersikukuh agar lembaga tersebut berdiri independen.

Terlepas dari proses pengesahan RUU PDP yang masih terus bergulir, masyarakat perlu mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi di era digital seperti sekarang. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum menyadari akan pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak masyarakat tidak menyadari internet yang memiliki dua sisi mata uang. Internet membantu kehidupan manusia, akan tetapi di sisi lain, internet juga sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sering kita temui kasus pencurian data pri-

badi yang digunakan untuk penipuan bahkan diperjualbelikan.

RUU PDP hadir dalam rangka untuk melindungi warga negara dari pencurian data pribadi yang berujung pada kejahatan di dunia maya. Hal ini yang harus menjadi pertimbangan sebagai upaya dalam melindungi warga negara Indonesia, tidak hanya mereka yang dewasa tapi juga anak-anak. Kasus pencurian data pengaduan yang terjadi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2021 menjadi titik tolak bahwa anak juga bisa menjadi korban kejahatan di dunia maya. Kasus ini terkuak pertama kali di akun Twitter @btxdarionlshop yang mengungkapkan akun bernama @C77 menjual dua database pengaduan KPAI di situs Raid-Forums pada 13 Oktober 2021. Data yang diunggah antara lain

nama, nomer identitas, email, telepon, pekerjaan, pendidikan, tempat dan tanggal lahir, dan beberapa data lain yang cukup sensitif seperti agama dan jenis kelamin.

Terkait perlindungan data pribadi anak, Indonesia sangat tertinggal dari negara lainnya. Pragma (2020) menyebutkan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris, telah lama mengatur tentang perlindungan data pribadi termasuk anak. Amerika Serikat memiliki aturan yang detail dan ketat dalam melindungi data pribadi anak. Data yang dilindungi di sana antara lain, nama depan serta nama keluarga (nama belakang), nama di media sosial (*screen name*), lokasi, nomer telpon, foto, video, dan audio. Sedangkan di Inggris, perihal terkait kepentingan anak,

transparansi penggunaan data, penggunaan data secara minimum, berbagi data, lokasi, pengawasan orang tua, teknik rekayasa perilaku anak agar sesuai dengan yang diinginkan, serta mainan anak yang terhubung secara online diatur secara ketat. Di Uni Eropa, perlindungan data pribadi anak diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) pasal 6 yang menyebutkan bahwa pemrosesan data anak harus berbasiskan legitimate interest dari si pemilik data.

Pengaturan perlindungan data pribadi anak di luar negeri terlihat sudah begitu canggih dan maju. Semua karena didasarkan adanya kesadaran bahwa setiap warga negara harus dilindungi data pribadinya, termasuk anak-anak. Pada dasarnya perlindungan data pribadi anak merupakan salah



satu upaya perlindungan hukum terhadap anak. Seorang anak belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan campurtangan negara dalam melindungi data pribadi mereka.

Bertolak dari pemaparan di atas, menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi anak merupakan hal yang menjadi perhatian utama negara-negara maju tersebut. Indonesia yang masih tertinggal jauh sudah seharusnya juga memberikan perhatian untuk melindungi warga negaranya dari segala kalangan, termasuk anak-anak. Meski masih jauh dari kata ideal, perlindungan data pribadi untuk warga negara Indonesia termasuk anak adalah sebuah keniscayaan. ***